

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
(BOSP) DI SD NEGERI EMEREUW KOTA JAYAPURA****Yosefina Sindi Ulukyanan¹***yosefinasindiulukyanan@gmail.com***Maylen K. P. Kambuaya²***kjayapura@gmail.com***Pascalina V. S. Sesa³***pascalinasesa@gmail.com***Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih****ABSTRACT**

This research was conducted with the aim of knowing the management of educational unit operational assistance funds (BOSP), financial reporting, accountability, transparency, internal and external inhibiting factors as well as efforts to overcome external and internal inhibiting factors carried out by the Education Unit Operational Assistance Fund (BOSP) Team at Emereuw Public Elementary School, Jayapura City. This type of research uses a quantitative descriptive type, data collection techniques using interview guide methods, and documentation with the participants of this study namely: Principals, Treasurers, Operators, and Teachers. The results showed that the internal causes of delays were: Human Resources (HR) which still required full attention from the school, especially the treasurer of BOSP funds in specific areas, the need for training and development of human resources (HR), Accuracy in tasks and responsibilities, increasing discipline in supervision, improving coordination and communication between parties involved in the management and reporting process. Factors causing external delays are the school budget activity planning application system (ARKAS), Schools also experience problems in running applications used by schools so they need to follow technical guidance from the relevant Office. When a treasurer of the education unit operational assistance fund (BOSP) or a school staff member is responsible for financial and administrative reporting, having a role in managing these tasks is an important factor in ensuring the efficiency and accuracy of reporting so as to avoid delays in education unit operational assistance funds (BOSP) at SD Negeri Emereuw.

Keywords: *analysis of education unit operational assistance fund management (bosp)*

1. PENDAHULUAN**1.1. Latar Belakang**

Dana BOS adalah prakarsa pemerintah yang dirancang untuk membantu sekolah-sekolah di Indonesia dalam memberikan kesempatan belajar yang lebih baik. Dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan sekolah, misalnya untuk keperluan dinas sekolah dan yayasan hingga pembelian perangkat media interaktif untuk membantu kegiatan pendidikan dan pembelajaran (Sari et al., 2021).

Dalam undang – undang No. 20 Tahun 2003, Pasal 6 ayat (1) tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menyebutkan bahwa setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar (RI, 2003). Selanjutnya peraturan menteri pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi Nomor 2 tahun 2022 tentang aturan khusus petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional untuk penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, bantuan operasional sekolah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pengelolaan dana alokasi khusus nonfisik sehingga perlu diganti menjadi Pedoman teknis pengelolaan dana bantuan operasional satuan pendidikan dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 (Permendikbudristek, 2022)

Fenomena yang penulis temui dilapangan yaitu terdapat keterlambatan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di tahun 2023 pada tahap I. Dimana dalam laporan rencana kegiatan anggaran sekolah (RKAS) dari sekolah ke pusat terdapat ketidaksesuaian, silpa, kehilangan atau tercecer bukti transaksi, terlambat pelaporan di BKU aplikasi rencana kegiatan anggaran sekolah (ARKAS) dan berdampak pada kegiatan sekolah yang belum bisa terlaksanakan akibatnya sekolah belum bisa membeli berbagai barang seperti pembelian barang praktikum yang belum bisa dilakukan oleh sekolah sementara dana BOS belum cair.

Beberapa artikel acuan dalam penelitian ini diantaranya: (Mogot, 2023) dengan judul Analisis pengelolaan keuangan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di sekolah menengah atas negeri olahraga sidoarjo (smanor). Penelitian bertujuan untuk menganalisis Pengelolaan Keuangan Sekolah di Sekolah Menengah Atas Negeri Olahraga Sidoarjo (SMANOR). Penelitian yang dilakukan oleh (Mite & Sala, 2023) dengan judul Gaya aplikasi pengolahan dana bantuan operasional sekolah berbasis web di SDN kobaleba kecamatan maukaro. Penelitian bertujuan untuk mempermudah proses pengolahan dana bantuan sekolah termasuk pengecekan data, penerimaan, serta pengeluaran dana, supaya pengolahan dana bantuan sekolah dilaksanakan dengan tertib, administratif, transparan dan terhindar dari penyimpangan. Dewi (2022) meneliti tentang analisis pengelolaan anggaran dana BOS terhadap akuntabilitas dan transparansi pelaporan pertanggungjawaban keuangan SDN 2 Galungan. Penelitian bertujuan untuk pengelolaan anggaran dana BOS terhadap pelaporan keuangan sekolah berdasarkan prinsip keadilan dan efisiensi karena kedua prinsip tersebut erat kaitannya dengan tahapan dalam pengelolaan keuangan sekolah pada tahap perencanaan dan realisasi anggaran.

1.2. Identifikasi Masalah

Permasalahan penelitian ini akan difokuskan pada:

- 1) Bagaimana pengelolaan dan pelaporan dana BOSP SD Negeri Emereuw Kota Jayapura berdasarkan aturan terbaru yaitu Permedikbudristek Nomor 63 tahun 2022 ?
- 2) Bagaimana akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana BOSP SD Negeri Emereuw Kota Jayapura berdasarkan aturan terbaru yaitu Permendikbudristek Nomor 63 tahun 2022 ?
- 3) Apa faktor penghambat internal dan eksternal dalam pengelolaan keuangan SD Negeri Emereuw Kota Jayapura ?
- 4) Upaya apa yang dilakukan sekolah dalam menangani faktor internal dan eksternal yang didapati dalam pengelolaan keuangan sekolah ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis bagaimana perencanaan dan penyusunan serta akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan BOSP di SD Negeri Emereuw Kota Jayapura serta mengidentifikasi faktor penghambat baik internal dan eksternal serta upaya sekolah dalam menangani faktor penghambat tersebut dalam pengelolaan dana BOSP. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi tambahan pengetahuan terkait pengelolaan pertanggungjawaban keuangan terkhusus pengelolaan dana BOSP dari Pemerintah kepada sekolah.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Stewardship

Menurut Donaldson & Davis 1991 teori stewardship adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para eksekutif sebagai steward termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan prinsipal, selain itu perilaku steward tidak akan meninggalkan organisasinya sebab steward berusaha mencapai sasaran organisasinya (Intan & Zulkarnain, 2022).

Hubungan teori stewardship dengan penelitian ini yaitu dapat menjelaskan peran pihak sekolah

sebagai institusi yang dapat dipercaya, melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai kepentingan sekolah, tepat, bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan yang diamanahkan, sehingga tujuan sekolah dan layanan sekolah serta program sekolah dapat dicapai secara maksimal dan sesuai tujuan yang telah ditentukan.

2.2. Pengelolaan Dana BOSP

Merupakan program pemerintah yang pada dasarnya ditujukan untuk menyediakan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar ataupun menengah untuk mendanai pelaksanaan program wajib belajar sembilan tahun dan mendanai beberapa kegiatan yang telah diatur sesuai ketentuan perundang-undangan yaitu permendikbud, No. 63 tahun 2022 tentang pengelolaan dana bantuan operasional satuan pendidikan (BOSP), harus dilakukan berdasarkan prinsip yang terdapat dalam peremdidbud diantaranya prinsip fleksibilitas, prinsip efektivitas, prinsip efisiensi, prinsip akuntabilitas, dan prinsip transparansi. Pengelolaan dana bantuan sekolah merupakan rangkaian aktivitas mengatur keuangan yang bersumber dari dana bantuan operasional sekolah dimulai dari perencanaan penggunaan, monitoring dan alokasi pelaporan pertanggungjawaban (Amin et al., 2022).

Terdapat dua jenis dana BOSP yaitu *pertama*, dana Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler, atau disingkat BOS Reguler Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 6 Tahun 2021 mematuhi tata cara pelaporan dana BOS, sekolah wajib menyusun laporan secara komprehensif sesuai dengan ketentuan dan mempublikasikan semua laporan mengenai penerimaan dan penggunaan dana BOS secara berkala. Penggunaan dana BOS reguler di sekolah dikenai pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan nasional dan daerah, dan dana BOS reguler dilaporkan kepada pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut (Hilendri et al., 2022).

Kedua, Dana BOS Kinerja adalah dana yang dialokasikan dan disalurkan untuk SD dan SMP yang dinilai berkinerja, sebagai sekolah berprestasi dan sekolah yang ditetapkan sebagai pelaksana program sekolah penggerak (Dikmen, 2022). Untuk membantu pelaksanaan program sekolah penggerak perlu adanya dukungan di tingkat pusat maupun daerah agar pelaksanaan program sekolah penggerak berjalan dengan lancar dan efisien, Salah satu bentuk dukungan sekaligus penghargaan dari pemerintah adalah alokasikannya dana BOS kinerja.

Fokus program Sekolah Penggerak mengikuti pengembangan holistik (sistem keseluruhan sebagai suatu kesatuan) antara karakter dan kompetensi hasil belajar para siswa. Kompetensi yang dimaksud adalah bidang numerasi atau berhitung dan literasi atau kecakapan sekolah penggerak yang dapat menerima BOS Kinerja adalah sekolah-sekolah tertentu yang telah memenuhi syarat.

2.3. Kompetensi Tim BOSP

Kompetensi merupakan pengetahuan, keterampilan dan faktor internal lainnya yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat melakukan pekerjaan berdasarkan pengetahuan dan keterampilan yang telah dimilikinya. Menurut Bauder dalam Busro 2018 menguraikan bahwa unsur kompetensi meliputi tingkat pendidikan, pengalaman kerja dan keterampilan kerja yang dimiliki.

Kompetensi teknis berhubungan dengan persyaratan yang harus dipenuhi untuk menduduki suatu jenjang jabatan tertentu dan kompetensi perilaku berkaitan dengan cara berperilaku yang harus ditunjukkan atau diperlihatkan oleh pemangku jabatan selama melaksanakan pekerjaan. Kompetensi yang harus dimiliki oleh bendahara pengeluaran adalah harus mampu mengelola dan mempertanggungjawabkan setiap penggunaan sumber daya khususnya penggunaan uang yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, menurut pendapat Bandiyono & Andri 2012.

Kompetensi bendahara sekolah diharapkan mampu menerima, menyimpan, membayarkan, menata usahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja sekolah yang dana bersumber dari APBN (Sopian et al., 2022).

2.4. Pengelolaan Keuangan Sekolah

Kegiatan administrasi keuangan dibutuhkan pendanaan agar dapat diatur, diupayakan, dibukukan secara transparan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan dan program sekolah. Dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan keuangan sekolah, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah serta meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah. (Sari et al., 2021).

Selain dana yang diperoleh dari Pemerintah Daerah atau sumber lain yang sah, pengelolaan dana BOSP harus berdasarkan kesepakatan bersama dan keputusan yang dibuat oleh tim dana BOSP di sekolah, termasuk dewan guru dan komite sekolah, yang harus terdaftar di RKAS karena merupakan sumber penerimaan (Sari et al., 2021).

Hasil kesepakatan penggunaan dana BOSP harus dinyatakan dengan tertulis dalam rapat (berita acara) yang dilampirkan dan ditandatangani oleh setiap orang yang hadir, dampak bahwa anggaran sekolah dapat dipengaruhi oleh berbagai karakteristik atau atribut sekolah yang menyebabkan anggaran mempengaruhi hasil belajar siswa (Sari et al., 2021).

Untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan, komponen keuangan dan pembiayaan perlu dikelola dan diawasi seefektif mungkin. Agar dana sekolah dapat digunakan secara efektif dan efisien, maka komponen keuangan pelaksanaan MBS perlu dikelola dengan baik dan menyeluruh mulai dari tahap penyusunan anggaran melalui pemanfaatan, pengawasan, dan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Karnila, 2021).

Pembukuan, khususnya pencatatan dana sekolah, untuk pemasukan dan pengeluaran berdasarkan jenis sumber dan jenis biaya sehingga atasan dan pihak lain dapat mengetahuinya. Jenis pembukuan BOSP ada beberapa, yaitu: Buku kas umum, buku pembantu kas, buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dan buku pembantu lainnya sesuai kebutuhan.

3. METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian yang dipilih adalah SD Negeri Emereuw Kota Jayapura. Jenis penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah deskriptif kuantitatif. Sumber data primer yang digunakan yaitu pendekatan wawancara kepala sekolah, komite sekolah, bendahara dan tim dana BOSP (guru). Sedangkan, sumber data sekunder yang digunakan adalah data dokumentasi. Peneliti juga melakukan observasi dalam mengesahkan data dari hasil penelitian peneliti menggunakan pendekatan triangulasi yaitu metode pengumpulan data yang menggabungkan berbagai metode dan sumber data. Dengan asumsi spesialis menggunakan strategi triangulasi, analisis benar-benar mengumpulkan informasi sambil menguji validitas informasi, untuk lebih spesifik memeriksa kepercayaan informasi dengan berbagai prosedur pengumpulan informasi dan sumber informasi yang berbeda (Indiarto et al., 2022).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Pengelolaan dan Pelaporan Dana BOSP SD Negeri Emereuw

Berdasarkan wawancara di lapangan informan mengemukakan bahwa :
“Penggunaan Dana BOSP digunakan sesuai dengan petunjuk teknis No. 63 Tahun 2022 serta penyusunan rencana kegiatan anggaran sekolah (RKAS), kepala sekolah selalu melibatkan bendahara, operator, komite dan juga dewan guru. Sumber daya manusia (SDM) pengelolaan BOSP terdiri dari bendahara BOSP dan tim anggaran. Bendahara BOSP ditunjuk dengan pertimbangan bahwa guru tersebut belum memegang keuangan sekolah lainnya dan tim belanja barang merupakan tim (guru) yang bersedia membantu tugas bendahara.

Kepala sekolah juga mengatakan bahwa komite sekolah juga berperan dan berpartisipasi dalam pelaksanaan BOSP, bentuk partisipasi komite sekolah di antaranya ikut membimbing, memberikan saran, dorongan dan pengawasan atas kegiatan yang telah direncanakan dapat dianggarkan dengan

segera dan mengetahui sejauh mana dana BOSP sudah dijalankan sesuai dengan rencana kegiatan anggaran sekolah (RKAS) terhadap pelaksanaan BOSP. Namun, komite terlepas dari pengelolaan dana BOSP. Dana BOSP diberikan dana dari pusat mengacu pada jumlah siswa sesuai dengan data dapodik dan petunjuk teknis No. 63 tahun 2022. Sedangkan, dalam RKAS ada tata cara merealisasikan tetap mengacu pada APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang disebut aliran kas per semester. Dimana 1 tahun ada 12 bulan dibagi 2 berarti 6 bulan, sehingga mejadi Tahap I / per semester 50% dan Tahap II / per semester 50%.

Selanjutnya masing-masing penanggungjawab program memegang rencana kegiatan anggaran sekolah (RKAS) kemudian akan merealisasikannya sesuai dengan jadwal yang telah ada. Misalnya program ujian tengah semester atau ujian akhir semester sesuai dengan jadwal yang tertera dalam rencana kegiatan anggaran sekolah (RKAS), diperiksa dan disetor ke bendahara kemudian ke kepala sekolah dan selanjutnya ke tim pengadaan yang akan dipesan melalui sistem informasi pengadaan sekolah (SIPLah). ” (JT, 16 juni 2023) “Sekolah menerima dana BOSP dengan syarat bahwa sekolah sudah memiliki SK Pendirian sekolah, Jumlah siswa sesuai petunjuk teknis dengan jumlah yang telah ditetapkan dan sekolah mampu menyiapkan laporan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana BOSP. Laporan pertanggungjawaban di input ke dalam aplikasi rencana kegiatan anggaran sekolah (ARKAS) secara online dan juga wajib melaporkan secara manual yaitu laporan pertanggungjawaban di print dalam bentuk data yang dilampirkan ke dalam kertas dan di bawah ke Dinas terkait sebagai laporan pertanggungjawabannya. Dalam pelaksanaan pengawasan dana BOSP dilakukan setiap hari terhadap semua kegiatan disekolah oleh kepala sekolah, koordinasi kepala sekolah dengan bendahara terkait dana BOSP yang akan dilaksanakan maupun sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan anggaran sekolah (RKAS) yang sudah di input ke Dinas terkait.” (PO, 14 juni 2023) “Pengelolaan dana BOSP sekolah disesuaikan berdasarkan delapan standar pendidikan nasional, yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi kelulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar penilaian. Dari delapan standar dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Dalam proses perealisasiian rencana kegiatan anggaran sekolah (RKAS), dapat dilihat misalnya, ATK (Alat Tulis Kantor) di bagian sarana mengajukan permintaan untuk keperluan pengadaan barang dan jasa ke bendahara dan selanjutnya ke kepala sekolah.

Kemudian, mengajukan ke tim pengadaan melalui aplikasi SIPLah (Sistem Informasi Pengadaan Sekolah). Lalu membuat surat pertanggungjawaban (SPJ) dan di download, apa bila di dalam aplikasi tidak terdapat barang tersebut maka bisa dilakukan dengan membeli barang tersebut secara langsung. Proses pengambilan dana di bank dibuktikan dengan adanya tanda tangan Kepala Sekolah dan Bendahara BOSP yang bertugas mengambil yaitu bendahara BOSP sesuai jumlah siswa dan akan dicairkan pada saat pengambilan sesuai kebutuhan.

Setelah diperiksa untuk disesuaikan dengan aturan-aturan keuangan dan petunjuk teknis BOSP kemudian bendahara BOSP akan membuat laporan sesuai dengan keperluan kedalam pembukuannya. Pembukuan ini yang digunakan untuk laporan pertanggungjawaban, diantaranya: buku kas umum, buku kas pembantu tunai, buku kas pembantu bank dan buku pembantu pajak. Pengawasan juga dilakukan dengan memeriksa laporan penggunaan keuangan dana BOSP setiap bulan atau per semester serta setiap pembelanjaan yang menggunakan dana BOSP juga diperiksa dengan melihat bukti nota atau kuitansi. Komite sekolah ikut berperan dalam pengawasan terhadap pelaksanaan BOSP sudah sejauh mana telah dilaksanakan dan sudah sesuai dengan rencana kegiatan anggaran sekolah (RKAS). (SDO dan YBD, 14 juni 2023)

Pengelolaan dana BOSP di SD Negeri Emereuw yaitu dilakukan rapat antara kepala sekolah, operator, bendahara dan guru. Dalam rapat tersebut dibicarakan apa saja kebutuhan sekolah dan kebutuhan guru sesuai dengan anggaran yang tersedia. Perencanaan anggaran mengacu kepada delapan

standar pendidikan nasional yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi kelulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar penilaian. Kepala Sekolah, operator, guru dan komite terdapat kesamaan jawaban tentang pengelolaan dana BOSP dan proses perencanaannya. penyaluran dana BOSP di SD Negeri Emereuw.

Penyaluran dana BOSP SD Negeri Emereuw diterima dalam 2 tahap, tahap pertama bulan januari sebesar 50%, tahap kedua bulan juli sebesar 50%, per semester dalam 1 tahun anggaran. Mengajukan ke tim pengadaan melalui aplikasi SIPLah (Sistem Informasi Pengadaan Sekolah). Proses pengambilan dana BOSP dilakukan oleh bendahara BOSP dengan bukti tanda tangan kepala sekolah dan pengambilan dana BOSP dapat diambil sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo. Penggunaan Dana BOSP digunakan untuk membiayai kegiatan sekolah operasional nonpersonalia yang telah dibuat oleh sekolah di awal periode anggaran.

Laporan pertanggungjawaban dana BOSP yang dibuat oleh bendahara BOSP dan pembantu bendahara sekolah mampu membuat laporan sesuai petunjuk juknis dan diinput ke dalam aplikasi rencana kegiatan anggaran sekolah (ARKAS) secara online dan juga wajib melaporkan secara manual laporan pertanggungjawaban di print dalam bentuk data yang dilampirkan ke dalam kertas dan di diberikan pelaporan ke Dinas Pendidikan Kabupaten dan Pusat. Pengawasan juga dilakukan dengan memeriksa laporan penggunaan keuangan dana BOSP setiap bulan atau per semester serta setiap pembelanjaan yang menggunakan dana BOSP dengan melihat bukti nota atau kuitansi. Komite sekolah ikut berperan dalam pengawasan terhadap pelaksanaan BOSP sudah sejauh mana telah dilaksanakan dan sudah sesuai dengan rencana kegiatan anggaran sekolah (RKAS).

4.2. Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Dana BOSP di SD Negeri Emereuw

Berdasarkan wawancara di lapangan informan mengemukakan bahwa :

“Transparansi dalam pengelolaan program pendidikan dapat menciptakan kepercayaan dari masyarakat, orang tua siswa, dan pemerintah terhadap integritas dan akuntabilitas sekolah. Dengan memberikan akses terbuka terhadap informasi terkait dengan kegiatan, anggaran, dan kebijakan sekolah, sekolah dapat membangun kepercayaan dan mendapatkan dukungan yang lebih besar dari masyarakat.” (JT. 16 juni 2023). “Keterbukaan yang diberikan oleh sekolah kepada orang tua siswa melalui informasi yang dipajang di mading, rapat orang tua dan disampaikan anggaran dana BOSP pada penerimaan raport, serta adanya laporan pertanggungjawaban atau akuntabilitas dari sekolah kepada orang tua siswa”. (SDO dan YBD, 14 juni 2023).

Proses akuntabilitas di SD Negeri Emereuw dilakukan dengan cara membuat laporan dana BOSP setiap 2 tahap per semester yaitu per 6 bulan dengan diketahui oleh kepala sekolah untuk dilaporkan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaporan keuangan pada SD Negeri Emereuw sudah dapat dikatakan akuntabel karena telah memenuhi prinsip yaitu, adanya laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOSP, adanya pengawasan terhadap proses penyusunan anggaran dana BOSP, dan pengelolaan dana BOSP memahami tugas dan fungsi terkait pelaporan pengelolaan dana BOSP.

Pelaporan keuangan pada SD Negeri Emereuw sudah dapat dikatakan transparansi karena telah memenuhi prinsip yaitu, adanya keterbukaan mengenai pengelolaan dana BOSP dan kemudahan pengaksesan informasi terkait penggunaan dana BOSP.

4.3. Faktor Penghambat Internal dan Eksternal Dana BOSP SD Negeri Emereuw

Berdasarkan wawancara di lapangan informan mengemukakan bahwa :

“Faktor penghambat internal seperti kelalaian dalam menatausahakan nota / kwitansi yang menjadi bukti pertanggung jawaban yang berdampak pada keterlambatan pelaporan dan penginputan di buku kas umum (BKU) ke dalam aplikasi rencana kegiatan anggaran sekolah (ARKAS) serta adanya Silpa dan rentang waktu pelaporan.” (SDO dan PO, 14 juni 2023). “Faktor penghambat eksternal ialah “Dalam penginputan pelaporan terkadang mengalami gangguan jaringan pada saat penginputan data, serta

terdapat fitur di dalam aplikasi yang harus di pelajari karena adanya perubahan melalui bimbingan teknis yang diikuti dalam kegiatan sosialisasi yang di adakan oleh Dinas terkait dan apa bila terjadi kesalahan pada penginputan data maka operator akan mengajukan perubahan namun perubahan tersebut tidak dapat langsung diubah, tetapi menunggu persetujuan dari Dinas terkait setelah diterima persetujuan operator harus menginput ulang data pelaporan, ini merupakan proses yang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dapat memperbaharui datanya”. (PO, 14 juni 2023).

Faktor penghambat internal yang terjadi pada saat pengelolaan dana BOSP adalah kurangnya ketelitian dan pengawasan dari kepala sekolah dan tim dana BOSP terlebih khusus ialah kelalaian yang di buat oleh bendahara yang berdampak pada pelaporan pertanggungjawaban, seperti hilang atau tercecernya bukti transaksi berupa nota-nota dan kuitansi-kuitansi. Faktor penghambat eksternal yaitu sekolah juga mengalami kendala dalam menjalankan aplikasi (ARKAS) yang dipakai oleh sekolah sehingga perlu mengikuti bimbingan teknis dari Dinas terkait merupakan penghambat.

4.4. Upaya Yang Dilakukan Sekolah Dalam Menangani Faktor Internal Dan Eksternal Di SD Negeri Emereuw

Berdasarkan wawancara di lapangan informan mengemukakan bahwa :

“Faktor internal: Harus lebih teliti dalam pengarsipan nota-nota atau kuitansi-kuitansi supaya saat pelaporan tidak terlambat. Mengadakan rapat bersama untuk mencari solusi dari masalah yang muncul atau didapati sebelum diinput kedalam aplikasi rencana kegiatan anggaran sekolah (ARKAS).” (JT dan SDO, 16 juli 2023). “Faktor eksternal: Lebih teliti dalam pelaporan buku kas umum dalam aplikasi rencana kegiatan anggaran sekolah (BKU ARKAS). Mengikuti kegiatan sosialisasi pengelolaan dan pelaporan penggunaan dana BOSP, yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan” (PO, 14 juni 2023).

Faktor internal sekolah harus lebih teliti dalam pengarsipan nota-nota atau kuitansi-kuitansi supaya saat pelaporan tidak terlambat. Mengadakan rapat bersama untuk mencari solusi dari masalah yang muncul atau didapati sebelum diinput kedalam aplikasi rencana kegiatan anggaran sekolah. Faktor eksternal sekolah harus lebih teliti dalam pelaporan buku kas umum dalam aplikasi rencana kegiatan anggaran sekolah (BKU ARKAS). Mengikuti kegiatan sosialisasi pengelolaan dan pelaporan penggunaan dana BOSP, yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

5. PENUTUP

Kesimpulan

Sekolah menerima dana BOSP dengan syarat bahwa sekolah sudah memiliki SK Pendirian sekolah, Jumlah siswa sesuai petunjuk teknis dengan jumlah yang telah ditetapkan dan sekolah mampu menyiapkan laporan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana BOSP. Pelaporan dana BOSP sekolah di SD Negeri Emereuw memenuhi tahapan antara lain menyampaikan laporan kepada Dinas untuk diperiksa setiap akhir semester baik secara online maupun manual.

Pengawasan dana BOSP di SD Negeri Emereuw terdiri dari pengawasan pihak internal sekolah melalui komite sekolah dan kepala sekolah, sedangkan pihak eksternal adalah Dinas terkait bersama dengan pemerintah pusat. Pengawasan dari pihak eksternal dilakukan apabila sekolah terlambat mengirimkan laporan pertanggungjawaban beserta bukti nota dan kuitansi dalam kurun waktu 6 bulan atau persemester tahap I dan tahap II maka pengawas dari Dinas terkait dan Pemerintah Pusat akan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh di SD Negeri Emereuw baik Kepala Sekolah, Operator, Bendahara BOSP dan Guru.

Komite sekolah di SD Negeri Emereuw juga berperan dan berpartisipasi dalam pelaksanaan BOSP, dalam membimbing, memberikan saran, dorongan dan pengawasan atas kegiatan yang telah direncanakan dapat dianggarkan dengan segera dan mengetahui sejauh mana Dana BOSP sudah dijalankan sesuai dengan rencana kegiatan anggaran sekolah (RKAS) terhadap pelaksanaan BOSP.

Walaupun pihak sekolah terutama kepala sekolah telah berusaha semaksimal mungkin untuk pengelolaan dana BOSP agar dapat tetap berjalan dengan baik, upaya yang dapat sekolah lakukan dalam menangani faktor internal terkait keterlambatan penerimaan dana BOSP tahap selanjutnya yaitu, apabila Dana BOSP terlambat dicairkan maka sekolah harus mengusahakan alternatif pinjaman lain agar dapat digunakan dan laporan yang dibuat harus tepat waktu baik secara online dan manual, apabila laporan terlambat dimasukkan maka lambat pula dana yang sekolah terima.

Saran

Bagi pengelola dana BOSP SD Negeri Emereuw, Saran yang diberikan kepada tim pengelola khususnya: Sumber daya manusia (SDM) yang masih memerlukan perhatian penuh dari pihak sekolah khususnya bendahara dana BOSP dalam bidang spesifik, perlu adanya pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM), Terkait penatausahaan dokumen bukti pertanggung jawaban, serta meningkatkan disiplin dalam pengawasan, meningkatkan koordinasi dan komunikasi antarpihak yang terlibat dalam proses pengelolaan pelaporan dan bagi Pemerintah dan Dinas Terkait Perlu adanya pengawasan yang rutin setiap tahun dalam pengelolaan dana BOSP di sekolah dan operator yang menjalankan aplikasi yang disediakan dapat dipilih langsung oleh Dinas terkait agar lebih memahami pengelolaan aplikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Intan, T. P., & Zulkarnain, Z. (2022). Analisis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada sekolah menengah kejuruan sukabumi. *Universitas Negeri Yogyakarta*, 1. <https://doi.org/10.29103/jam.v1i2.8307>
- Permendikbudristek. (2022). Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan. In *Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi*. https://jdih.kemdikbud.go.id/detail_peraturan?main=3238
- RI, P. P. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 6 Ayat 1*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43920/uu-no-20-tahun-2003>
- Sari, P. ... Sari, E. P. (2021). Analisis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada SDN 060864. *Universitas Negeri Yogyakarta*, 1(2), 1–13. [http://repository.binadarma.ac.id/333/%0Ahttp://repository.binadarma.ac.id/333/2/Laras %28bab 1%29.pdf](http://repository.binadarma.ac.id/333/%0Ahttp://repository.binadarma.ac.id/333/2/Laras%20bab%201%29.pdf)
- Amin, N. W. ... Mariadi, Y. (2022). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (Bos) pada sekolah dasar di kecamatan mataram tahun 2021. *Riset Mahasiswa Akuntansi*, 2(1), 166–174. <https://doi.org/10.29303/risma.v2i1.193>
- Arti, T. (2020). *Analisis pengelolaan anggaran dana BOS terhadap akuntabilitas dan transparansi pelaporan pertanggungjawaban keuangan di SMA Negeri 21 Gowa*. 14. <https://all3dp.com/2/fused-deposition-modeling-fdm-3d-printing-simply-explained/>
- Ayunda Pininta Kasih. (2022). *Komponen Kegiatan Sekolah yang Dibiayai Dana BOS 2022*. Kompas.Com. <https://www.kompas.com/edu/read/2022/02/26/195413671/20-komponen-kegiatan-sekolah-yang-dibiayai-dana-bos-2022?page=all>
- Bahrum, A. F. &. (2019). *Manajemen Kepala sekolah dalam pengelolaan dana bantuan operasional (BOS) pada SMP Negeri*. 2012, 1–6.
- BOSP, J. (2023). *Permendikbudristek 63 Tahun 2022 tentang Juknis BOSP*. Jogloabang. <https://www.jogloabang.com/pendidikan/permendikbudristek-63-2022-juknis-bosp>
- Dewi, M. S. D. dan D. P. A. P. (2022). *Analisis Pengelolaan anggaran dana BOS terhadap akuntabilitas dan transparansi pelaporan pertanggungjawaban keuangan SDN 2 galungan*. 7.
- Dikmen, D. &. (2022). *Kebijakan Pengelolaan Dana Bos*.

- <https://ditpsd.kemdikbud.go.id/artikel/detail/kebijakan-pengelolaan-dana-bos-tahun-2022>
- Fadli, N. (2018). Analisis pengelolaan keuangan sekolah (studi kasus sekolah menengah atas negeri 1 bandar kabupaten bener meriah). *Jurnal Teknik Informatika*, 85.
- Gojali, T. (2022). Analisis Peningkatan kualitas sekolah dengan adanya bantuan dana BOS. *Analisis Peningkatan Kualitas Sekolah Dengan Adanya Bantuan Dana BOS*, 7(10), 1–23.
- Gunawan, I. G. H., & Sumada, I. M. (2021). Implementasi program BOS pada SDN 1 blahkiuh kecamatan abiansemal kabupaten badung. *Widyanata*, 18(1), 21–29.
- Hidayat, R. ... Al ma'ruf, A. ma'ruf. (2019). Efektivitas pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dalam meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan (studi di SDN 44 mande kota bima). *JIAIP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 7(2), 93. <https://doi.org/10.31764/jiap.v7i2.1269>
- Hilendri, B. A. ... Nurabiah, N. (2022). Analisis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di SD Negeri 1 Sukamulia Kabupaten Lombok Timur. *Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di SD Negeri 1 Sukabumi Kabupaten Lombok Timur*, 6. <https://ejournal.pelitaIndonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/article/view/2096/984>
- Hilibanua. (2022). *Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasioanl Sekolah (BOS) di SDN 071167*. Ferdy Setiawan Lahagu, Eka Septiani Laoli, Netti Kariani Mendofa. <https://www.simantek.sciencemakarioz.org/index.php/JIK/article/view/367/344>
- Indiarto, I. R. ... Pratiwi, R. (2022). Analisis rencana dan pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) terhadap transparansi keuangan tahun 2019 (Studi kasus pada SDN Cakung barat 04 pagi). *Akuntansi Manajemen Journal of Cakrawala (JAMC)*, 29(2), 1–10. <http://cakrawala.stieswadaya.ac.id/cakrawala/index.php/dsn/article/view/122>
- Jaya, H. (2021). Analisis Pengelolaan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos). *Journal of the Accounting Study Program*, 15(82), 43–49.
- Jenderal, D. (2018). *Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Menengah*. Pendidikan, Direktorat Jenderal. <https://arkas.kemdikbud.go.id/tentang>
- Kabarpapua. (2016). *Dana BOS mempercepat layanan pendidikan di kota jayapura*. Kabarpapua.Co, Kota Jayapura. <https://kabarpapua.co/dana-bos-mempercepat-layanan-pendidikan-di-kota-jayapura/>
- Karnila. (2021). Analisis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di SDN 118279 sapil-pil II kecamatan torgamba kabupaten labuhanbatu selatan. *Frontiers in Neuroscience*, 14, 1–69.
- Keuangan, K. (2022). *Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)*. Direktorat Jenderal Perbendaharaan. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/pontianak/id/data-publikasi/berita-terbaru/2927-dana-bantuan-operasional-sekolah-bos.html>
- Kurnia, R. (2023). *Aturan Baru Dana BOS, Berikut Perbedaannya dengan Aturan Lama* Artikel ini telah tayang di [TribunPontianak.co.id](https://tribunPontianak.co.id) dengan judul *Aturan Baru Dana BOS, Berikut Perbedaannya dengan Aturan Lama*, <https://pontianak.tribunnews.com/2023/01/10/aturan-baru-dana-bos-be>. Pontianak.Tribunnews.Com. <https://pontianak.tribunnews.com/2023/01/10/aturan-baru-dana-bos-berikut-perbedaannya-dengan-aturan-lama>
- Laurensia M. Perangin Angin, M. P. dan D. A. P. (2022). *Implementasi Manajemen Pengelolaan Kelas di Sekolah*. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=uDSnEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Menurut+Depdiknas+\(2000\)+bahwa+manajemen+keuangan+merupakan+tindakan+pengurusan/ketatausahaan+keuangan+yang+meliputi+pencatatan,+perencanaan,+pelaksanaan,+pertanggungjawaban+dan+p](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=uDSnEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Menurut+Depdiknas+(2000)+bahwa+manajemen+keuangan+merupakan+tindakan+pengurusan/ketatausahaan+keuangan+yang+meliputi+pencatatan,+perencanaan,+pelaksanaan,+pertanggungjawaban+dan+p)
- Makarim, N. A. (2021). *Mendikbud sebut dana BOS papua barat naik 30% lebih*. Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat. <https://papuabarot.bpk.go.id/wp->

content/uploads/2021/03/Catatan-Berita-Dana-BOS-Papua-Barat-Naik-30-Persen.pdf

- Matani, C. D., & Bleskadit, N. H. (2022). Mengenali isu akuntabilitas manajemen dana bantuan operasional eekolah (BOS) di Provinsi Papua. *KEUDA (Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah)*, 7(1), 70–89. <https://doi.org/10.52062/keuda.v7i1.2135>
- Mite, A. B., & Sala, E. E. (2023). *Berbasis web di SDN kobaleba kecamatan maukaro*. 8(1), 88–94.
- Mogot, T. F. (2023). *Analisis pengelolaan keuangan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di sekolah menengah atas*. 3(2), 617–624.
- Muhammadiyah. (2021). *Pengertian Teori Stewardsip. Accounting*. <https://www.coursehero.com/file/85902238/RINGKASAN-TEORI-STEWARDSHIPdocx/>
- Mulyati, E. I. (2019). Pengelolaan Keuangan Sekolah. In *Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan*.
- Nurwana, L. W. (2023). *Pengaruh aplikasi rencana kegiatan anggaran sekolah (ARKAS) dan aplikasi sistem informasi manajemen BOS terhadap akuntabilitas*. 05(04), 13139–13152.
- Pemerintah, P. (2003). Undang-undang republik indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. In *Records management journal* (Vol. 1, Issue 2, pp. 1–15). <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.88.5042&rep=rep1&type=pdf%0Ahttp://www.ideals.illinois.edu/handle/2142/73673%0Ahttp://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-33646678859&partnerID=40&md5=3ee39b50a5df02627b70c1bdac4a60ba%0Ahttp://pusatinformasi.rkas.kemdikbud.go.id/hc/en-us/articles/7579193193753-Tentang-SiLPA->
- Pendidikan. (2022). *Tentang SiLPA*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia. <https://pusatinformasi.rkas.kemdikbud.go.id/hc/en-us/articles/7579193193753-Tentang-SiLPA->
- Permendikbudristek. (2022). Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan. In *Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi*. https://jdih.kemdikbud.go.id/detail_peraturan?main=3238
- Progo, K. (2016). *Pembiayaan pendidikan di sekolah dasar negeri ngrojo*. 54–68.
- Rachman, D. ... Nugraha, T. (2022). *Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Efektifitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SMA SASAMA*. 13,1-17.
- Rahayuningsih, S. (2021). Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). *Alhamra Jurnal Studi Islam*, 1(2), 110. <https://doi.org/10.30595/ajsi.v1i2.10128>
- Rubiyati, W. R., & Ismanto, B. (2020). Evaluasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Dasar. *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian Dan Kajian Kepustakaan Di Bidang Pendidikan, Pengajaran Dan Pembelajaran*, 6(2), 220. <https://doi.org/10.33394/jk.v6i2.2614>
- Rumanti, L. (2020). *Pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (studi kasus, sekolah dasar negeri kecemen yogyakarta. bisnis ritel - ekonom*
- Saihudin. (2018). *Manajemen Institusi Pendidikan*. https://www.google.co.id/books/edition/Manajemen_Institusi_Pendidikan/PtV5DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Sumber+keuangan+dan+pembiayaan+pada+suatu+lembaga+pendidikan/sekolah+secara+garis+besar+dapat+dikelompokan+atas+tiga+sumber+yaitu+:+1.%09Pemerintah,+baik+pe
- Saisarani, K. G. P., & Sinarwati, N. K. (2020). Analisis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di Sma Negeri 4 singlaraja tahun 2020. *Jurnal Imiah Akuntansi Dan Humanika*, 11(2), 340–348. <https://doi.org/10.23887/v11i2.34447>
- Sari, P. ... Sari, E. P. (2021). Analisis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada SDN 060864. *Universitas Negeri Yogyakarta*, 1(2), 1–13. <http://repository.binadarma.ac.id/333/%0Ahttp://repository.binadarma.ac.id/333/2/Laras%28bab%201%29.pdf>

- Solikhatun, I. (2016). Analisis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (Bos) (studi pada smk negeri 1 yogyakarta). *Jurnal Kajian Pendidikan Akuntansi Indonesia*, 5(5), 1–13.
- Sopian ... Johantri, B. (2022). Mengukur Akuntabilitas Dana Bantuan Operasional Sekolah. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 6(1), 59–80. <https://doi.org/10.30871/jama.v6i1.3921>
- Surakarta, P. D. B. O. S. di S. negeri K. I. (2017). No Title. *Subkhi Widatmobo Dan Suyatmini*, 12. <https://journals.ums.ac.id/index.php/jmp/article/view/5528/3603>
- Suryatmini, T. N. &. (2023). Pengelolaan dana bantuan operasional sekolah di sekolah dasar negeri. *Manajer Pendidikan*, 4(1). <https://doi.org/10.31538/v4i1L.331>
- Utomo, Y. A. & P. D. W. (2010). *Implementasi kebijakan program bantuan operasional sekolah (BOS) di Kota Jayapura Papua*. Universitas Gajah Mada. <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/48449>
- W, L. O. (2014). *Tinjauan atas sistem akuntansi pengelolaan keuangan sekolah pada SMP Negeri Satu Atap Jati*. <https://repository.unikom.ac.id/id/eprint/26445>